

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh setelah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Viva Dlanggu adalah sebagai berikut.

- Apotek merupakan salah satu fasilitas kesehatan dan merupakan tempat dilaksankannya praktek kefarmasian oleh apoteker dengan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar
- Apoteker berperan penting dalam menjalankan praktek kefarmasian di apotek karena berurusan langsung dengan masyarakat. Oleh sebab itu kompetensi dan profesionalitas dari apoteker harus dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan untuk meningkatkan citra apoteker di dalam masyarakat
- Selain praktek kefarmasian, apoteker juga bertanggung jawab sebagai manager di suatu apotek dimana apotek harus dapat mengatur perencanaan dan pengadaan obat serta sumber daya manusia yang ada di apotek tersebut.
- PKPA telah membantu calon apoteker untuk dapat memberikan wawasan keadaan yang terjadi di lapangan kerja di apotek. Melalui PKPA calon apoteker telah mendapat pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan praktis mengenai pelayanan kefarmasian dan sistem managerial di apotek.
- Viva Apotek Dlanggu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai tempat pengabdian profesi dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

- Viva Apotek Dlanggu melaksanakan pelayanan kesehatan yang berorientasi untuk kepentingan masyarakat seperti pengendalian keamanan, efektivitas, ketepatan, dan kerasionalan penggunaan obat, baik obat yang diberikan melalui resep ataupun obat bebas.
- Viva Health Apotek Dlanggu sudah menjalankan aspek manajemen dan pelayanan kefarmasian dengan baik.
- Praktek kerja profesi di Apotek sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi para calon Apoteker yang akan terjun ke masyarakat untuk memberikan pengabdian dan pelayanan dibidang kesehatan terutama sebagai Apoteker Pengelola Apotek.

BAB VI

SARAN

1.1 Saran

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang telah dilaksanakan di Apotek Libra selama lima minggu, yang berlangsung mulai tanggal 16 Januari – 17 Februari 2017, ada beberapa saran atau masukan bagi calon apoteker, sebagai berikut:

a. Mahasiswa calon apoteker perlu meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi sehingga dapat memberikan informasi yang baik dan tepat kepada pasien, serta membekali diri dengan pengetahuan yang cukup tentang obat-obatan yang sering digunakan oleh masyarakat agar dapat memberikan pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat dengan benar dan jelas.

b. Mahasiswa calon apoteker sebaiknya membekali diri dengan dasar pelayanan kefarmasian, undang-undang kefarmasian dan manajemen apotek. Dengan demikian diharapkan calon apoteker lebih siap dalam melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek, sehingga waktu PKP selama lima minggu benar-benar dapat dimanfaatkan dengan efektif dan efisien.

c. Mahasiswa calon apoteker harus berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan PKP di apotek agar dapat memperoleh informasi yang optimal sehingga dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan dalam mengelola apotek.

d. Mahasiswa calon apoteker juga diharapkan dapat mempelajari macam - macam obat dari berbagai kelas terapi agar wawasan dan pengetahuan yang didapatkan lebih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2017. [Online]. <[http:// www.medical-explorer.com/ drugs-c/ cataflam_1.html](http://www.medical-explorer.com/drugs-c/cataflam_1.html)> diakses pada tanggal 1 Maret 2017.

BMA. [2011]. British Medical Association [Online]. Diakses pada tanggal 5 Maret 2017

Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik. 2005, *Pharmaceutical Care untuk Penyakit Diabetes Mellitus*, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan,

Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik. 2007, *Pedoman Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas*, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Jakarta.

Jakarta.

Katzung, Bertram, G. 1997. *Farmakologi Dasar dan Klinik* , Edisi Ke 6. Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta : 737-741.

Kimble *et al.* 2009. *The Clinical Use Of Drugs. Applied Therapeutics*. American

Lacy, F. C., Armstrong, L. L., Goldman, P. M. and Lance, L. L., 2009. *Drug Information Handbook*, ed. 17th. American Pharmacists Association, North American

McEvoy, G. K., 2011. *AHFS Drug Information Essential*. American Society of Health-System Pharmacists, Inc., Bethesda, Maryland

Menkes RI, 1993. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.922/ Menkes/ Per/ 1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Ijin Apotek. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Menkes RI, 2002. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1332/ Menkes/ SK/ X/ 2002 tentang Ketentuan dan

Tata Cara Pemberian Izin Apotek. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta

Monthly Index of Medical Specialities (MIMS), Inc. [2015]. MIMS Drug Information System. [Online]. diakses pada tanggal 1 Maret 2017.

Patient. [2017]. Patient Information UK. [Online]. <patient.info>. diakses pada tanggal 1 Maret 2017.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/ Menkes/ Per/ V/ 2011 tentang Registrasi, Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 919/ MenKes/ Per/ X/ 1993 tentang Kriteria Obat yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/ Menkes/ Per/ X/ 1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Apotik.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.

Seto, S., Yunita, N., dan Lily, T., 2012, Manajemen Farmasi Lingkup Apotek, Farmasi Rumah Sakit, Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi, ed. 3, Juniar Moechtar (Ed), Airlangga University Press, Surabaya

Sweetman, S. C., 2009. Martindale The Complete Drug Reference, ed. 36th . The Pharmaceutical Press, London.

Tatro, D. S., 2003, A to Z Drug Fact, Fact and Comparison.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 2009. Presiden Republik Indonesia. Jakarta